

TESIS

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**



**Diajukan Oleh
Gilang Fitri Hermawan
2120216310025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2023**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
Gilang Fitri Hermawan
2120216310025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2023**

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

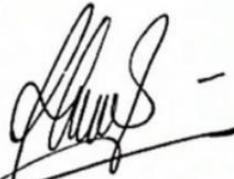


**Disusun Oleh
Gilang Fitri Hermawan
2120216310025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2023**

Tesis ini
Telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
Pada tanggal 14 Juni 2023

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP : 19730420 200312 2 002

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP : 198302172 00591 2 009

Menyetujui

Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP : 19730420 200312 2 002

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal 14 Juni 2023

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

PENGESAHAN REVISI TESIS

Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama

disusun oleh

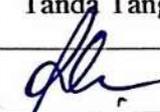
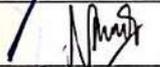
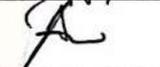
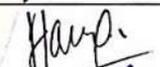
Nama : Gilang Fitri Hermawan, S.H

NIM : 2120216310025

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji

Pada Tanggal:

Susunan Penguji

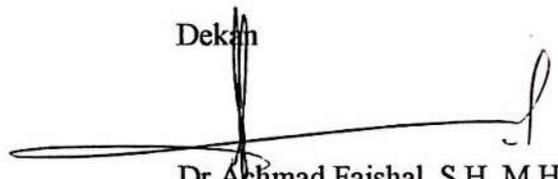
No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H	Ketua Penguji	
2	Dr.Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H	Sekretaris	
3	Dr.H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H	Anggota	
4	Dr.Hj.Noor Hafidah, S.H.,M.Hum	Anggota	
5	Dr.Saprudin, S.H.,LL.M	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan


Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP.197304202003122002

Dekan


Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Fitri Hermawan

NIM : 2120216310025

Program Studi : Kenotariatan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Gilang Fitri Hermawan

NIM. 2120216310025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 278/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

Gilang Fitri Hermawan

Dengan Judul Tesis:

Implikasi Pembatalan Perkawinan terhadap Pembagian Harta Bersama
Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Direktur,



Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
196805071993031020

RINGKASAN

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA

Oleh :

Gilang Fitri Hermawan,¹ Rahmida Erliyani², Nurunnisa³

Implikasi pembatalan perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terutama apabila para pihak menuntut bagian harta benda perkawinan yang telah terbentuk. Apabila sebelum terjadinya pembatalan perkawinan, tidak terdapat perjanjian kawin pisah harta dan harta bersama telah terbentuk, hal ini mengakibatkan harta benda yang tergabung tersebut harus dibagi secara adil dan melindungi hak-hak para pihak. Selain itu jika terjadi perselisihan atau sengketa, pada saat ini hanya dapat diselesaikan secara musyawarah saja. Pentingnya aturan yang mengatur pembagian harta bersama setelah pembatalan perkawinan untuk kehidupan bermasyarakat yang tentram.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tentang penyelesaian pembagian harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan serta menganalisa implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap penyelesaian pembagian harta bersama, sejauh mana pembagian harta bersama dalam hal terjadi pembatalan perkawinan diatur. Karena terjadinya kekosongan hukum tentang pembagian harta bersama setelah pembatalan perkawinan, aturan hukum nasional perlu mengatur hal tersebut agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat pada masa yang akan datang.

Pengaturan hukum tentang penyelesaian pembagian harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia, baik pada Undang-Undang perkawinan maupun Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya tidak diatur, hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Implikasi hukum pembatalan perkawinan terhadap penyelesaian pembagian harta bersama adalah menimbulkan ketidakjelasan terhadap pembagian harta bersama itu sendiri, seperti apa harta tersebut harus dibagi, tidak ada kepastiannya secara hukum. Tetapi untuk pembagian harta bersama mengenai perceraian diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, secara analogi ketentuan ini juga bisa diterapkan dalam penyelesaian pembagian harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan.

¹ NPM : 2120216310025

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

LEGAL CONSEQUENCE OF MARRIAGE NULLIFICATION UPON DIVISION OF MARITAL PROPERTY

By

Gilang Fitri Hermawan¹, Rahmida Erliyani², Nurunnisa³
Master of Notarial Studies Program, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Keywords: *Marriage Nullification, Marital Property*

Abolition of a marriage because of marriage nullification and division of marital property which must be conducted as a consequence of marriage nullification becomes one of the matters which must be regulated expressly by the State, but in Indonesia it has not been concretely regulated, so it brings about vacuum of law. This research is aimed at studying how the law regulates the settlement of division of marital property division of marital property after the existence of the marriage nullification and to study how the legal consequence of marriage nullification upon marital property marital property according to Act Number 1 of 1974 concerning Marriage, Civil Code, Compilation of Islamic Law and Customary Law. This is normative legal research, the characteristic of the research is prescriptive, namely to answer the legal issues by describing, studying, and explaining precisely, and analyzing the prevailing legislation as well as doctrines, with the objective to get answers to the subject matter being studied. The results of the research are *firstly*, the legal regulations concerning the settlement of division of marital property division of marital property after the existence of the marriage nullification in Indonesia law cannot be found in Marriage Act and other Acts and it is not regulated in other legal regulations, this matter arises vacuum of law. *Secondly*, the legal consequence of marriage nullification upon marital property, it has brought about vagueness on the division of marital property itself, how the said property will be divided, there is no legal certainty. But for the division of marital property as a consequence of a divorce, it has been regulated in Article 37 of Marriage Act. Analogically, this provision can also be applied for the settlement of the division of marital property after there is a marriage nullification.

Certified by,



¹Student number: 212021310025

²Supervisor

³Co-supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Translator

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., anugerah dan berkat limpahan-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul : **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Abah, Mama, segenap keluarga tercinta Ka Bayu, Galang, Galih, Ka Ridha dan Sasa yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini
2. Bapak Dr. Ahmad Faisal S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing, memberikan arahan dan masukan serta memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini

6. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
8. Segenap Staf Akademik terutama Pak Iwan dan Ka Rizky, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
9. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021, Ka Aulia, Selva, Ka Aufa, Grup Pejuang Wisuda, Ka Wahyu, Ka Steven, Sharon, Opi, Naga dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis .

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 5 Juli 2023



Gilang Fitri Hermawan, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	35
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	41
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN.....	43
A. Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan	43
B. Pembagian Harta Bersama Setelah Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dalam Perundangan	58
C. Pembagian Harta Bersama Setelah Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	81
BAB III AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.....	97

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Hubungan Suami Isteri.....	97
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Pembagian Harta Bersama	102
C. Pengaturan Hukum Mengenai Pembagian Harta Bersama Setelah Pembatalan Perkawinan Untuk Masa Yang Akan Datang.....	115
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	

